

Bima Arya Ingin Integrasikan Jalur Sepeda Bogor-Jakarta Sepanjang 60 Km

BOGOR (IM) - Kota Bogor terus meningkatkan fasilitas untuk para pesepeda dengan membangun jalur sepeda di beberapa wilayah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya berkeinginan mengintegrasikan jalur sepeda Bogor-Jakarta sepanjang 60 kilometer yang berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Saya ingin bersamasama dengan Gubernur DKI bisa mengintegrasikan itu karena setiap weekend banyak sekali pesepeda dari Jakarta ke Bogor ataupun Bogor ke Jakarta," kata dia beberapa waktu lalu.

Bahkan dia ingin mengajak Anies mencicipi gowes di jalur tersebut. "Saya sudah coba Bogor ke Jakarta bersepeda 60 kilometer," kata Bima Arya.

Politikus PAN itu mengatakan jalur sepeda itu bukan hanya untuk olahraga tapi mobilitas penduduk yang mendekati warga seputar Jabodetabek.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan di Kota Bogor saat ini sudah dibangun beberapa jalur khusus sepeda dan jalur sepeda yang memakan 1,2 meter badan jalan.

"Namun, jalan tersebut nantinya masih dapat digunakan pengendara roda dua maupun roda empat, ketika tidak ada pesepeda di jalur tersebut," kata dia.

Dengan pembangunan jalur sepeda ini, para pesepeda tidak hanya berputar di jalur sistem satu arah (SSA) atau di sekitaran Kebun Raya Bogor. Sebab sejauh ini, jalur khusus sepeda di Kota Bogor hanya ada di Jalur SSA atau di Jalan Ahmad Yani.

"Pemkot Bogor di tahun ini telah menyiapkan alokasi anggaran untuk menyambungkan ruas jalan Ahmad Yani, menyambung ke Jalan Sudirman, hingga ruas Jalan Otista," kata dia. ● **gio**

Bupati Bogor Soal Perizinan: Banyak yang Bilang 1 Pintu Banyak Jendela

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bogor, terus berupaya mendorong kemudahan investasi dan berusaha di Bumi Tegar Beriman. Bupati Ade Yasin mengakui masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP).

Ade mengakui bahwa DPMP/TSP Kabupaten Bogor, saat ini belum maksimal dalam pelayanan perizinan. Meski sudah menasibkan diri sebagai pelayanan satu pintu, dalam praktiknya masih ada saja ketidakmudahan dalam pelayanan.

"Banyak yang bilang satu pintu tapi banyak jendela. Itu yang mau kami benahi. Sehingga tidak ada lagi jendela atau jalur tikus perizinan. Insya Allah akan dibenahi terus," kata Ade Yasin di Bogor, Senin (27/12) Kata Ade, saat ini Pemkab Bogor tengah fokus melayani masyarakat dan investor dengan kemudahan berbasis digital atau daring.

Ade juga mengakui bahwa Pemkab Bogor tengah merancang peraturan daerah (perda) untuk memudahkan investasi, yang direncanakan rampung

Desember 2021.

"Potensi investasi di Kabupaten Bogor sangat besar. Karena Kabupaten Bogor kan daerah berkembang. Untuk itu, kami ingin perizinan ini sudah satu pintu secara fakta di lapangan, sehingga memudahkan masyarakat maupun investor," terang politikus PPP itu.

Pemkab Bogor juga tengah menyiapkan gerai pelayanan publik, sebagai upaya mempermudah pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu berbasis digital.

"Mudah-mudahan kita bisa segera membangun gedung gerai pelayanan publik sendiri, tidak lagi di mal, karena mal tidak cukup untuk mewakili masyarakat dan untuk UMKM, tahun ini kami juga programkan bantuan pengurusan perizinan untuk UMKM, misal izin usaha, izin halal. Bahkan kaitan perizinan tahun 2020-2021 kami sudah memberikan bantuan kepada pondok pesantren dan madrasah bantuan pengurusan perizinan. Kewajiban kita membantu mempermudah, salah satunya bantuan mendasar yaitu perizinan," tandasnya. ● **gio**



RAZIA VAKSIN DAN TES ANTIGEN ACAK DI CIKARANG

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada penumpang bus yang belum mengikuti vaksinasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/12). Petugas memberlakukan vaksin ditempat bagi penumpang yang belum mengikuti vaksinasi dan tes Antigen acak untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Tahun Baru, Kendaraan Menuju Puncak Dialihkan ke Jonggol dan Sukabumi

BOGOR (IM) - Polres Bogor memberlakukan pengalihan arus lalu lintas (lalin) bagi kendaraan roda empat menuju Puncak Bogor melalui ruas Sukabumi dan Jonggol pada malam pergantian Tahun Baru. Kapolres Bogor, AKBP Harun menyebut, hal itu guna meminimalisir kepadatan lalu lintas saat malam pergantian tahun. Untuk itu, lanjutnya Kepolisian Resor Bogor bakal memberlakukan pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan roda empat.

Pengalihan arus lalu lintas ini akan diberlakukan di Simpang Pos Polisi IB atau setelah pintu keluar Gerbang Tol (GT) Ciawi menuju Ciawi-Sukabumi, juga di GT Cibubur mengarah Ciawi dialihkan menuju Jonggol.

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, pengalihan tersebut akan berlangsung selama 12 jam mulai tanggal 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.

"Menjelang pergantian tahun nanti kita akan melakukan pengalihan arus kendaraan di mulai dari Jumat (31/12/2021) pukul 18.00 WIB hingga Sabtu

(1/1/2022) pukul 06.00 WIB," ucap Harun, Senin (27/12).

Harun menjelaskan, kendaraan-kendaraan tersebut nantinya akan dialihkan menuju arah Ciawi-Sukabumi atau Jonggol. Hal ini dilakukan guna meminimalisir pergerakan orang atau pembatasan kendaraan pada malam pergantian Tahun Baru.

Harun melanjutkan, petugas gabungan yang terdiri dari Polri-TNI, Dishub, dan Satpol-PP Kabupaten Bogor telah dipersiapkan untuk melakukan pengamanan ekstra ketat bagi pelaku perjalanan yang menuju kawasan Puncak.

Petugas akan memeriksa sertifikat vaksin Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi dan bukti hasil tes negatif rapid antigen yang berlaku 1x24 jam.

Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan jajarannya untuk memberlakukan sistem ganjal genap bagi kendaraan roda dua dan empat selama 24 jam penuh. "Sekarang ini masih dalam situasi pandemi, untuk itu diharapkan seluruh masyarakat dapat meningkatkan disiplin prokes dan hindari kerumunan," kata dia. ● **gio**

8 | Nusantara



KASAD KUNJUNGI KELUARGA KORBAN KECELAKAAN NAGREG

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) berbincang dengan keluarga almarhumah Salsabila di Desa Ciaro, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/12). Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengunjungi rumah duka serta berziarah ke makam kedua korban tabrak lari yang diduga melibatkan oknum TNI AD.

Ade Yasin Optimistis Target 215 Jembatan Rawayan Bisa Tercapai

Bupati Bogor, Ade Yasin meminta diberikan waktu tambahan (periode selanjutnya) untuk membangun total 215 jembatan rawayan di seluruh wilayah Bumi Tegar Beriman. Dan dia optimistis bisa menuntaskan rencana tersebut.

CIBINONG (IM) - Sejak memimpin, Bupati Bogor, Ade Yasin merencanakan pembangunan jembatan rawayan sebanyak 215. Masa jabatannya pun akan berakhir 2023,

dan masih menyisakan utang sebanyak 94 jembatan.

Pembangunan jembatan rawayan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dilakukan demi menyambungkan akses eko-

nomi, akses pertanian, akses pendidikan, akses pariwisata, akses kesehatan dan lain sebagainya.

Namun, bencana alam tanah longsor, banjir maupun bencana wabah Covid-19 menghambat rencana pembangunan jembatan rawayan yang digagas Ade Yasintersebut. Hingga akhir Tahun 2021 ini, Pemkab Bogor atau Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) baru membangun 39 jembatan rawayan.

DPKPP Kabupaten Bogor berencana membangun 30 jembatan rawayan dan 50 jem-

batan rawayan di Tahun 2023.

Jumlah jembatan rawayan tersisa itu, di akhir kepemimpinan Ade Yasin ada di angka 94 jembatan rawayan. Karena pada tahun ini ada dua perusahaan swasta yang membangun jembatan rawayan, sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR).

"Tahun 2020, di tengah refocusing anggaran karena pandemi Covid-19 kami memaksakan membangun 6 jembatan rawayan, Tahun 2021 ditambah 33 jembatan rawayan, Tahun 2022 dan 2023 kami akan membangun 80 jembatan, sementara tahun ini 2 jembatan rawayan dibangun dari dana CSR hingga tersisa 94 jembatan rawayan lagi setelah habis periode saya memimpin Kabupaten Bogor," kata Ade Yasin kepada wartawan, Senin (27/12).

Politisi PPP ini pun meminta diberikan waktu tambahan (periode selanjutnya) untuk membangun total 215 jembatan rawayan di seluruh wilayah Bumi Tegar Beriman, ia optimistis bisa menuntaskan rencana tersebut.

"Untuk menghindari korban luka maupun jiwa akibat luapan air sungai, maka kewajiban saya dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis untuk menyediakan sa-

rana jembatan rawayan. Saya optimistis bisa membangun total 215 jembatan rawayan, asalkan saya dikasih waktu dan kepada desa harus bisa menyakinkan masyarakatnya," pintanya.

Divawancara terpisah, Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menuturkan bahwa pembangunan jembatan rawayan setidaknaya melena biaya Rp 1,9 atau Rp. 2 milyar hingga cukup 'memakan' anggaran.

"Anggaran pembangunan jembatan rawayan ini cukup besar. Hingga kami butuh waktu untuk menuntaskan pembangunan 215 jembatan rawayan, selain dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan CSR, biaya pembangunannya juga bisa bersumber dari dana desa ataupun satu milyar rupiah satu desa (Sami Sade)," tutur Ajat.

Ia melanjutkan bahwa jembatan rawayan juga bisa menjadi destinasi wisata, di mana pengelolannya dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES).

"Jembatan rawayan yang sudah terbangun, pengelolannya akan diserahkan ke pemerintah desa. Jembatan ini bisa menjadi objek wisata, asalkan BUMDES bisa mengemasnya secara baik," lanjutnya. ● **gio**

Tegas Tolak TPST Rumpin, HMR Ngadu ke Dewan

CIBINONG (IM) - Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) menolak rencana Pemkab Bogor yang ingin membangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Rumpin di Desa Kampung Sawah, Rumpin.

HMR pun langsung mendatangi DPRD Kabupaten Bogor, Senin (27/12).

Kedatangan para civitas akademik itu tak lain untuk mengadakan penolakan bakal dibangunnya TPST Rumpin.

"Kami menolak rencana pembangunan TPST Rumpin, karena meragukan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola sampah sebanyak 200 ton per hari hasil pembuangan sampah masyarakat Rumpin dan kecamatan di sekitarnya," tegas Ketua Umum HMR, Ibnu Sakti Mubarak kepada wartawan.

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan alas lainnya menolak Pembangunan TPST Rumpin, karena pembuangan sampah di Bumi Tegar Beriman belum terpilah di mana sampah yang organik dan non organik masih tercampur.

"Bagaimana mau baik pengelolaan sampahnya, kalau sampah organik dan non organik masih tercampur. Kami juga mengeluhkan rendahnya sosialisasi TPST Rumpin yang dilakukan oleh DLH, padahal kami juga bagian dari masyarakat Kecamatan Rumpin," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharrom menentu-

kung penolakan

TPST Rumpin yang disuarakan oleh para mahasiswa, apalagi di lokasi seluas 8,5 hektare akan dibangun sirkuit road race yang sudah direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Bogor.

"Bagaimana bisa dalam satu lokasi ada dua pembangunan yang bertolak belakang pemanfaatannya, kami dan juga masyarakat lebih memilih dibangun sirkuit road race ketimbang TPST. Karena lebih bermanfaat secara ekonomi. Alasan lain kami menolak TPST, karena tak ingin, sampah dari wilayah lain seperti Kota Tangerang Selatan akan dibuang ke Kecamatan Rumpin," ucap Aan

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susanto meminta tidak ada tumpang tindih perencanaan, oleh karena itu, jajarannya akan memanggil Dispora dan DLH Kabupaten Bogor.

"Bagaimana bisa satu lokasi dibangun dua area, yaitu sirkuit road race dan TPST Rumpin. Kami lebih mendukung di lokasi dibangun sirkuit road race karena detail engineering designnya (DED) sudah jadi, karena akan lebih menghidupkan ekonomi masyarakat, dan juga menjadi tempat pengembangan bakat para anak muda, apalagi visi Kabupaten Bogor sebagai The City of Sport and Tourism. Kami segera memanggil Dispora dan DLH, untuk menyampaikan rekomendasi kami," pinta Rudy. ● **gio**



PERESMIAN TEMAN BUS TRANS METRO PASUNDAN

Petugas memeriksa kesiapan fasilitas bus Trans Metro Pasundan saat peresmian di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/12). Kementerian Perhubungan meluncurkan Teman Bus melalui program "buy the service" pada Trans Metro Pasundan sebagai angkutan massal yang melayani rute di seluruh kawasan cekungan Bandung Raya guna mempermudah layanan transportasi bagi masyarakat dan salah satu solusi mengatasi kemacetan.